

Determinan pengelolaan keuangan BUMDes: perspektif transparansi dan akuntabilitas

Wahyu Anggit Prasetya*, Putri Puspita

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: anggit.prasetya@unimma.ac.id

DOI: 10.31603/bacr.13952

Abstract

This research seeks to examine how transparency and accountability influence the financial management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Magelang Regency. This research is important because financial governance serves as a fundamental basis for ensuring the sustainability and public trust in BUMDes. A quantitative approach was employed using a survey technique involving 101 respondents from BUMDes classified as advanced and developing. The study utilized questionnaires for data collection, which were subsequently analyzed through multiple linear regression. The results show that transparency and financial accountability have a positive effect on the quality of BUMDes financial management. These findings suggest that information disclosure and a reliable accountability system are critical factors in achieving effective financial management. This study offers practical contributions to strengthening BUMDes governance through the enhancement of transparent and accountable reporting systems.

Keywords: BUMDes; financial management; transparency; accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Magelang. Penelitian ini penting dilakukan karena tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap BUMDes. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei yang melibatkan 101 responden dari BUMDes yang tergolong dalam kategori maju dan berkembang. Kuesioner digunakan sebagai instrumen pengumpulan data, yang selanjutnya diolah menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan BUMDes. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi serta sistem pertanggungjawaban yang akurat dan dapat dipercaya merupakan faktor penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif. Studi ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola BUMDes melalui peningkatan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: BUMDes; pengelolaan keuangan; transparansi; akuntabilitas.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi desa menjadi fokus strategis dalam kebijakan pemerintah Indonesia dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Masjidin & Yuliani, 2021). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Ratmasari et al., 2021). Lembaga ini berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi ditingkat desa dengan memanfaatkan dan mengembangkan aset serta potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh jenis usaha yang dijalankan, tetapi juga oleh sejauh mana pengelolaan keuangannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes, yang menghambat efektivitas tata kelola dan menurunkan kepercayaan publik. Kondisi ini menunjukkan urgensi dilakukannya penelitian yang mampu mengevaluasi secara empiris peran kedua faktor tersebut dalam konteks kelembagaan desa.

Mengacu pada laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dirilis pada Oktober 2024, tercatat bahwa hanya 75,8% BUMDes di Indonesia yang berstatus aktif, sementara sisanya belum menunjukkan kinerja kelembagaan yang optimal (Khaerunnisa, 2024). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Niar et al (2024) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar BUMDes diberbagai wilayah belum mengimplementasikan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan secara standar. Praktik pencatatan keuangan umumnya masih bersifat manual dan minim dokumentasi pendukung, serta belum dilengkapi dengan mekanisme audit internal yang memadai (Niar et al., 2024). Fakta ini mengindikasikan bahwa permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan BUMDes merupakan isu struktural yang bersifat nasional.

Dalam konteks lokal, kondisi serupa juga teridentifikasi di Kabupaten Magelang. Penelitian terhadap BUMDes Ngudi Raharjo di Desa Girikulon, Kecamatan Secang, misalnya, mengindikasikan bahwa meskipun unit usaha tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp24.316.200 pada tahun 2022, praktik pengelolaan keuangannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta minimnya infrastruktur pendukung sistem pengawasan (Hidayat, 2023). Ketiadaan mekanisme pelaporan dan pengawasan internal yang andal di tingkat desa menunjukkan bahwa tantangan dalam tata kelola BUMDes tidak hanya berkaitan dengan skala usaha, tetapi juga dengan kelemahan dalam struktur institusionalnya.

Tabel 1 menunjukkan jumlah BUMDes di Kabupaten Magelang mencapai 354 unit dan hanya 38 yang dikategorikan sebagai maju dan berkembang, sehingga sekitar 89 % masih berada pada tahap dasar atau tumbuh. Terdapat gap yang jelas antara keberadaan kelembagaan BUMDes secara kuantitatif dan kualitas pengelolaan keuangan secara kualitatif. Banyak BUMDes di Magelang belum menjalankan standar seperti publikasi laporan berkala, forum pertanggungjawaban masyarakat atau mekanisme pengawasan internal yang efektif yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha (Febriyan & Lestari, 2023). Ketiadaan saluran transparan tersebut menciptakan kekosongan dalam akuntabilitas, yang menyulitkan

pemangku kepentingan untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan secara objektif (Murti & Maharani, 2023). Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis regresi linier berganda untuk menguji secara langsung pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang terukur dan berbasis data atas kontribusi masing-masing variabel.

Tabel 1. Data BUMDes di Kabupaten Magelang

No.	Kategori BUMDes	Jumlah BUMDes
1	Maju	9
2	Berkembang	29
3	Tumbuh	191
4	Dasar	125
Jumlah BUMDes		354

Sumber: Kemendes PDTT, 2023

Berbagai studi sebelumnya telah meneliti pengaruh faktor-faktor seperti transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Namun, hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian Wishmilia & Akbar (2023) dan Fitri & Arza (2023) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fahisa & Afriyenti (2023) dan Akbar et al (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan (Baihaqi et al., 2023; Solihah et al., 2022; Wishmilia & Akbar, 2023). Hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Manisa et al (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini mengindikasikan perlunya eksplorasi lanjutan dengan konteks lokal yang lebih spesifik serta pendekatan variabel yang lebih komprehensif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus lokus di BUMDes Kabupaten Magelang dengan kategori maju dan berkembang, yang sebelumnya jarang dijadikan subjek dalam riset sejenis. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif teoretis yang lebih tajam dengan menggabungkan pendekatan *agency theory* dan *stakeholder theory* secara simultan dalam menganalisis mekanisme tata kelola keuangan di tingkat desa.

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran transparansi dan sistem akuntabilitas dalam memengaruhi tata kelola keuangan BUMDes di Kabupaten Magelang. Fokus pada BUMDes kategori maju dan berkembang dipilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan tata kelola keuangan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui penguatan perspektif *agency theory* dan *stakeholder theory* dalam konteks lembaga ekonomi desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi tuntutan masyarakat guna membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Nurwidiawati & Nurhadianto, 2021). Dalam perspektif *agency theory* yang dijelaskan oleh Meckling & Jensen (1976), transparansi sangat penting untuk mengurangi permasalahan asimetri informasi yang kerap terjadi antara pemilik modal (prinsipal),

yaitu masyarakat, dan pengelola (agen), yakni pengurus BUMDes. Ketika informasi keuangan tersedia secara terbuka, maka peluang bagi pengurus untuk melakukan penyimpangan atau moral hazard akan berkurang. Pengawasan efektif dari masyarakat dan pihak pengawas lainnya akan meningkat karena mereka memiliki akses terhadap informasi yang memadai.

Peran pihak luar sangatlah penting dalam proses pengawasan terhadap segala kegiatan dan keputusan yang dilakukan oleh pengurus (Sofi et al., 2022). Dalam kerangka *stakeholder theory* yang dijelaskan oleh Freeman (1984) menjelaskan bahwa transparansi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang relevan terhadap pengelolaan BUMDES. Keterbukaan informasi memungkinkan para stakeholder berpartisipasi dalam proses evaluasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan, sehingga pengurus lebih terdorong untuk mengelola keuangan secara hati-hati dan akuntabel.

Selain itu, prinsip *good governance* menempatkan transparansi sebagai salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang baik, sesuai yang tercantum dalam IFAC - International Federation of accountantes (2001). Tingkat transparansi yang tinggi dapat menyebabkan potensi praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalkan dan pengambilan keputusan berbasis data dapat dilakukan dengan lebih akurat.

Penelitian yang dilakukan Baihaqi et al. (2023) membuktikan bahwa transparansi merupakan faktor penting yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan. Studi yang dilakukan oleh Fahisa & Afriyenti (2023) juga menyatakan bahwa transparansi berkontribusi secara positif pada efektivitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, transparansi dipandang sebagai faktor yang berpengaruh positif dalam mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa khususnya BUMDes tidak terlepas dari akuntabilitas (Sweetenia et al., 2019). Dalam perspektif *agency theory*, hubungan antara masyarakat sebagai pemilik modal (*prinsipal*) dan pengurus BUMDes sebagai pengelola (*agen*) berpotensi memunculkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi (Meckling & Jensen, 1976). Akuntabilitas berperan penting dalam mengurangi potensi perilaku oportunistik yang dapat merugikan masyarakat dengan cara menciptakan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan yang ketat. Adanya kewajiban pelaporan dan pengawasan, pengurus akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, serta terdorong untuk mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Selain itu, dalam kerangka *stakeholder theory*, pengelolaan keuangan BUMDES tidak hanya bertanggung jawab kepada satu pihak saja, melainkan harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat (Freeman, 1984). Akuntabilitas mendorong pengurus untuk lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyusun serta melaksanakan anggaran, agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

Lebih lanjut, dari sudut pandang prinsip *good governance*, akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (IFAC - International Federation of accountantes, 2001). Dengan adanya sistem akuntabilitas yang kuat, pengelolaan keuangan BUMDes menjadi lebih terkendali, profesional, dan terhindar dari penyimpangan. Akuntabilitas juga

menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, keterbukaan dan komitmen dalam penggunaan dana publik.

Penelitian yang dilakukan oleh [Wishmilia & Akbar \(2023\)](#) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan berkontribusi secara positif pada efektivitas pengelolaan keuangan. Studi yang dilakukan oleh [Fitri & Arza \(2023\)](#) menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian [Wishmilia & Akbar \(2023\)](#). Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan seluruh variabel diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas keuangan, dan pengelolaan keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu BUMDes di Kabupaten Magelang dan menggunakan populasi dengan kategori maju dan berkembang. Alasan penggunaan objek dan populasi tersebut dikarenakan masih adanya kesenjangan pengelolaan BUMDes. Maka penggunaan populasi dengan kategori tersebut untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan BUMDes sehingga dapat memperoleh kategori maju dan berkembang hingga tahun 2023. Hal tersebut nantinya akan dapat menjadi pandangan BUMDes lain yang masih dalam kategori tumbuh dan dasar sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMDes di tahun berikutnya dan diharapkan mampu berkembang lebih baik serta dapat berada pada kategori yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif teoretis yang lebih tajam dengan menggabungkan pendekatan *agency theory* dan *stakeholder theory* secara simultan dalam menganalisis mekanisme tata kelola keuangan di tingkat desa.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Tujuannya adalah untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Magelang.

2.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kategori *maju* dan *berkembang* di Kabupaten Magelang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria responden sebagai berikut:

- a. Menjabat sebagai direktur, bendahara, atau sekretaris;
- b. Memiliki masa kerja minimal satu tahun; dan
- c. Terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Total kuesioner yang disebar sebanyak 108, dan sebanyak 101 kuesioner dapat diolah (tingkat respons 93,5%).

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner tertutup sebagai instrumen penelitian kepada pengelola BUMDes. Kuesioner terdiri dari pernyataan-pernyataan yang diukur

dengan skala likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Instrumen disusun berdasarkan indikator yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu.

2.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini, digunakan empat variabel utama yang seluruhnya diukur menggunakan skala likert seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Indikator Utama	Sumber
Transparansi	Keterbukaan informasi, akses dokumen, kejelasan informasi.	(Wishmilia & Akbar, 2023)
Akuntabilitas Keuangan	Kesesuaian prosedur, kejujuran pelaporan, pertanggungjawaban.	(Wishmilia & Akbar, 2023)
Pengelolaan Keuangan	Efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan ketepatan informasi.	(Wishmilia & Akbar, 2023)

2.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

pengujian validitas instrumen dilakukan dengan uji *confirmatory factor analysis* (CFA). Hasil pengujian mengindikasikan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* > 0,50 dan memenuhi syarat *kaiser-meyer-olkin* (KMO)>0,50. Satu indikator (AK1) dieliminasi karena nilai *loading*<0,50. Hasil uji instrumen tingkat reliabilitas, dengan hasil sebagai berikut: transparansi (0,853), akuntabilitas keuangan (0,889), dan pengelolaan keuangan (0,844). Nilai *cronbach's alpha* pada seluruh variabel >0,70, yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel.

2.5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda guna mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial. Proses analisis dibantu oleh perangkat lunak statistik SPSS. Kelayakan model diuji melalui koefisien determinasi (*adjusted R²*), uji F (*goodness-of-fit*), dan uji t (signifikansi parameter regresi).

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 101 responden yang merupakan pengelola BUMDes kategori maju dan berkembang di Kabupaten Magelang. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (55,4%) dengan rentang usia dominan 30-45 tahun (60,4%). Dari sisi pendidikan, sebagian besar lulusan SMA (47,5%), dengan jabatan utama sebagai direktur (35,6%) dan bendahara (34,6%). Seluruh responden telah bekerja selama 1-5 tahun. Tabel 3 menunjukkan banyaknya sampel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas 101 kuesioner, dengan tingkat respons sebesar 93%.

Tabel 3. Tingkat Pengembalian Kuesioner BUMDes Kabupaten Magelang

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	108
Kuesioner yang tidak dikembalikan	(5)
Kuesioner yang kembali	103
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	(2)
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	101
Persentase kuesioner yang kembali	95%
Persentase kuesioner yang dapat diolah	93%

Sumber: data primer diolah pada tahun 2024

3.2. Statistik Deskriptif

Deskripsi statistik dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4 Hasil deskriptif menunjukkan bahwa secara umum seluruh variabel memiliki rerata yang tinggi, mengindikasikan persepsi positif responden terhadap pengelolaan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev	Min	Max
Transparansi	4,32	0,547	1,00	5,00
Akuntabilitas Keuangan	4,37	0,494	1,00	5,00
Pengelolaan Keuangan	4,48	0,514	1,00	5,00

Sumber: data primer diolah pada tahun 2024

3.3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti valid dan reliabel. Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh indikator pengukuran pada variabel pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntansi keuangan memiliki nilai KMO > 0,50.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO and Barlett's Test	Keterangan
Pengelolaan Keuangan	0,785	Memenuhi Syarat
Transparansi	0,795	Memenuhi Syarat
Akuntabilitas Keuangan	0,883	Memenuhi Syarat

Sumber: data primer diolah pada tahun 2024

Tabel 6 menunjukkan *cross loading* untuk indikator pengukuran ketiga variabel lebih dari 0,50, kecuali satu indikator akuntabilitas (AK1). Selanjutnya, indikator akuntabilitas yang nilai *cross loading*-nya tidak memenuhi syarat dieliminasi dan dilakukan pengujian ulang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas sudah valid.

Tabel 6. Cross Loading

ITEM	PK	TR	AK	Ket
PK1	0,790			Valid
PK2	0,685			Valid
PK3	0,767			Valid
PK4	0,807			Valid
PK5	0,769			Valid
PK6	0,715			Valid
TR1		0,780		Valid
TR2		0,780		Valid
TR3		0,757		Valid
TR4		0,802		Valid
TR5		0,698		Valid
TR6		0,577		Valid
TR7		0,771		Valid
AK2			0,795	Valid
AK3			0,698	Valid
AK4			0,691	Valid
AK5			0,704	Valid
AK6			0,771	Valid
AK7			0,805	Valid
AK8			0,797	Valid
AK9			0,743	Valid

Sumber: data primer diolah pada tahun 2024

Hasil uji reliabilitas pada [Tabel 7](#) menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* seluruh indikator pengukuran variabel lebih dari 0,70. Artinya, seluruh indikator pengukuran variabel sudah reliabel.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengelolaan Keuangan	0,844	Reliabel
Transparansi	0,853	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan	0,889	Reliabel

Sumber: data diolah pada tahun 2024

3.4. Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda dilakukan guna menganalisis sejauh mana transparansi dan akuntabilitas keuangan memengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes. Berdasarkan koefisien regresi yang ditunjukkan pada [Tabel 8](#), diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PK = 0,492 + 0,145TR + 0,768AK + e$$

Tabel 8. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.
Konstanta	0,492	1,819	0,072
Transparansi	0,145	2,289	0,024
Akuntabilitas Keuangan	0,768	10,975	0,000

Sumber: data primer diolah pada tahun 2024

Tabel 9 menunjukkan nilai *adjusted R*² sebesar 0,696. Artinya, variabel transparansi dan akuntabilitas keuangan mampu menjelaskan variabel pengelolaan keuangan sebesar 69,6%.

Tabel 9. Hasil Uji R²

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,838 ^a	0,702	0,696	0,28376

Sumber: data primer diolah pada tahun 2024

Tabel 10 menunjukkan hasil uji kecocokan model penelitian dengan uji F. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai $p \text{ value} < 0,05$ dan $f_{\text{hitung}} = 115,588 > f_{\text{tabel}} = 3,09$.

Tabel 10. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresi	18,614	2	9,307	115,588	0,000 ^b
Residual	7,891	98	0,081		
Total	26,506	100			

Sumber: data primer diolah pada tahun 2024

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 11, diketahui bahwa pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan memiliki nilai $t \text{ hitung} = 2,289 > t \text{ tabel} = 1,984$ dan $p \text{ value} = 0,024 < \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sehingga H1 diterima. Nilai $t \text{ hitung}$ pada pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan memiliki nilai $t \text{ hitung} = 10,975 > t \text{ tabel} = 1,984$ dan $p \text{ value} = 0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sehingga H2 diterima.

Tabel 11. Hasil Uji T

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Transparansi	2,289	1,984	0,024	H1 Diterima
Akuntabilitas keuangan	10,975	1,984	0,000	H2 Diterima

Sumber: data primer diolah pada tahun 2024

3.5. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Temuan ini konsisten dengan teori stakeholder, bahwa transparansi merupakan bentuk pemenuhan hak informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jalannya organisasi. Informasi yang terbuka dan mudah diakses memungkinkan

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini memperkuat legitimasi pengelolaan BUMDes dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Hasil ini sejalan dengan temuan empiris sebelumnya yang menegaskan adanya terdapat hubungan positif antara prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan manajemen keuangan BUMDes (Baihaqi et al., 2023; Solihah et al., 2022; Wishmilia & Akbar, 2023).

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Temuan tersebut mendukung pandangan teori agensi, bahwa pengelola (agen) memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yakni masyarakat desa. Adanya tata kelola akuntabilitas yang tinggi pada BUMDes, maka mekanisme pengawasan menjadi lebih efektif untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pengelola dan masyarakat.

Temuan ini juga didukung oleh *teori stakeholder* yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan organisasi. Akuntabilitas keuangan yang baik mencerminkan komitmen pengelola dalam memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholder utama, seperti masyarakat desa, pemerintah desa, dan lembaga pengawas lainnya. Praktik akuntabilitas yang memadai mendorong tersedianya laporan keuangan yang jujur, mekanisme kontrol internal yang efektif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDes. Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan (Baihaqi et al., 2023; Fahisa & Afriyenti, 2023).

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dalam aspek keuangan memengaruhi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Magelang. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan, berpengaruh positif terhadap praktik pengelolaan keuangan BUMDes. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan informasi kepada publik serta adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks BUMDes, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pengelola BUMDes dan pemerintah desa untuk terus mendorong praktik pengelolaan keuangan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Ini dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang terbuka, sistem pelaporan berkala, serta peningkatan kapasitas tata kelola berbasis prinsip *good governance*. Dukungan kebijakan dan supervisi dari pemerintah daerah juga diperlukan agar praktik-praktik ini terstandarisasi secara menyeluruh. Penelitian ini terbatas pada BUMDes kategori maju dan berkembang di satu wilayah kabupaten, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk semua BUMDes di Indonesia. Disarankan agar riset selanjutnya melibatkan wilayah penelitian yang lebih

beragam dan memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pengelolaan keuangan, seperti budaya organisasi, sistem pengawasan internal, atau partisipasi masyarakat.

Referensi

- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., & Suryantara, A. B. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716–725. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310>
- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15–36. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Febriyan, I., & Lestari, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang). *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 184–193. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i3.629>
- Fitri, R. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari: Studi Empiris pada Nagari di Kota Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1115–1126. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.824>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*.
- Hidayat, Y. (2023). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3(2), 128–143. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.128-143>
- IFAC - International Federation of accountantes. (2001). Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective - International public sector study. In *Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective* (Number August, bll 1–93).
- Khaerunnisa, R. (2024). *BPKP sebut baru 75,8 persen BUMDes di Indonesia yang aktif*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/4392098/bpkp-sebut-baru-758-persen-bumdes-di-indonesia-yang-aktif?>
- Manisa, S. F., Manaroinson, J., & Sumual, M. (2020). Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(2), 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>
- Masjidin, U. L., & Yuliani, N. L. (2021). Determinasi Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 156–166. <https://doi.org/10.31603/bacr.6354>

- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial behavior, agency costs and ownership structure*, 3(4), 305–360.
- Murti, W. A., & Maharani, B. (2023). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten purworejo. *Borobudur Accounting Review*, 3(1), 55–66.
- Niar, U. S. I., Oktavendi, W. T., & Irawan, D. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berdasarkan Prinsip Corporate Governance Di Kabupaten Magetan. *Value : Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 18(3), 1081–1091. <https://doi.org/10.32534/jv.v18i3.5122>
- Nurwidiawati, S., & Nurhadianto, T. (2021). Analisis Faktor Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah: Studi pada Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 182–195. <https://doi.org/10.31603/bacr.6220>
- Ratmasari, D. I., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2021). Kualitas Laporan Keuangan BUMDES dan Faktor yang mempengaruhinya. *Borobudur Accounting Review*, 1(1), 66–77. <https://doi.org/10.31603/bacr.4892>
- Sofi, H., Mranani, M., & Pramita, Y. D. (2022). Pengaruh Personal Background, Political Background, Pengetahuan Anggaran dan Akuntabilitas Terhadap Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Borobudur Accounting Review*, 2(2), 123–137. <https://doi.org/10.31603/bacr.7761>
- Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 136–154. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Wishmilia, S. A., & Akbar, F. S. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Pacet. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 1414–1426. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6574>